

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai bentuk acuan penelitian dari teori-teori yang berkaitan dengan indikator penelitian yang berasal dari buku referensi, studi kepustakaan juga dilakukan dari hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai masukan serta tambahan bahan pengajian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Penelitian oleh Alive M Kawung, Johny Lumolos, Stefanus Sampe yang berjudul **“Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat di kelurahan Mahakaret Timur Kecamatan wenang Kota Manado”** Dalam melakukan penelitian dan penulisan oleh penulis sebagai berikut; teori yang di sampaikan oleh Suharsimi Arikunto tidak terjadi secara keseluruhan di lapangan dengan dalil bahwa program bantuan pangan nontunai mulai dari kepesertaan atau kondisi penerima dan ketersediaan e-warong tidak sesuai dengan apa yang di harapkan, teori mengatakan bahwa evaluasi di fokuskan pada komponen-komponen program di lapangan, sedangkan komponen-komponen di lapangan seperti penerima bantuan pangan nontunai adalah masyarakat dengan ekonomi di atas UMP Provinsi Sulawesi Utara serta ketersediaan e-warong yang minim.
2. Penelitian oleh Ana Rosaliana, Susi Hardjati dengan **judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya”**. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo sejauh ini telah terlaksana secara tepat waktu, baik penyaluran dana bantuan pangan dari pemerintah ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maupun penyaluran dana bantuan operasional e-warong dari pemerintah ke pengelola e-warong. Selain dari segi waktu, efektivitas program BPNT dilihat dari sisi ketepatan pilihan. Menurut Makmur (2011), ketepatan pilihan merupakan ketepatan dalam memilih suatu kebutuhan, pekerjaan,

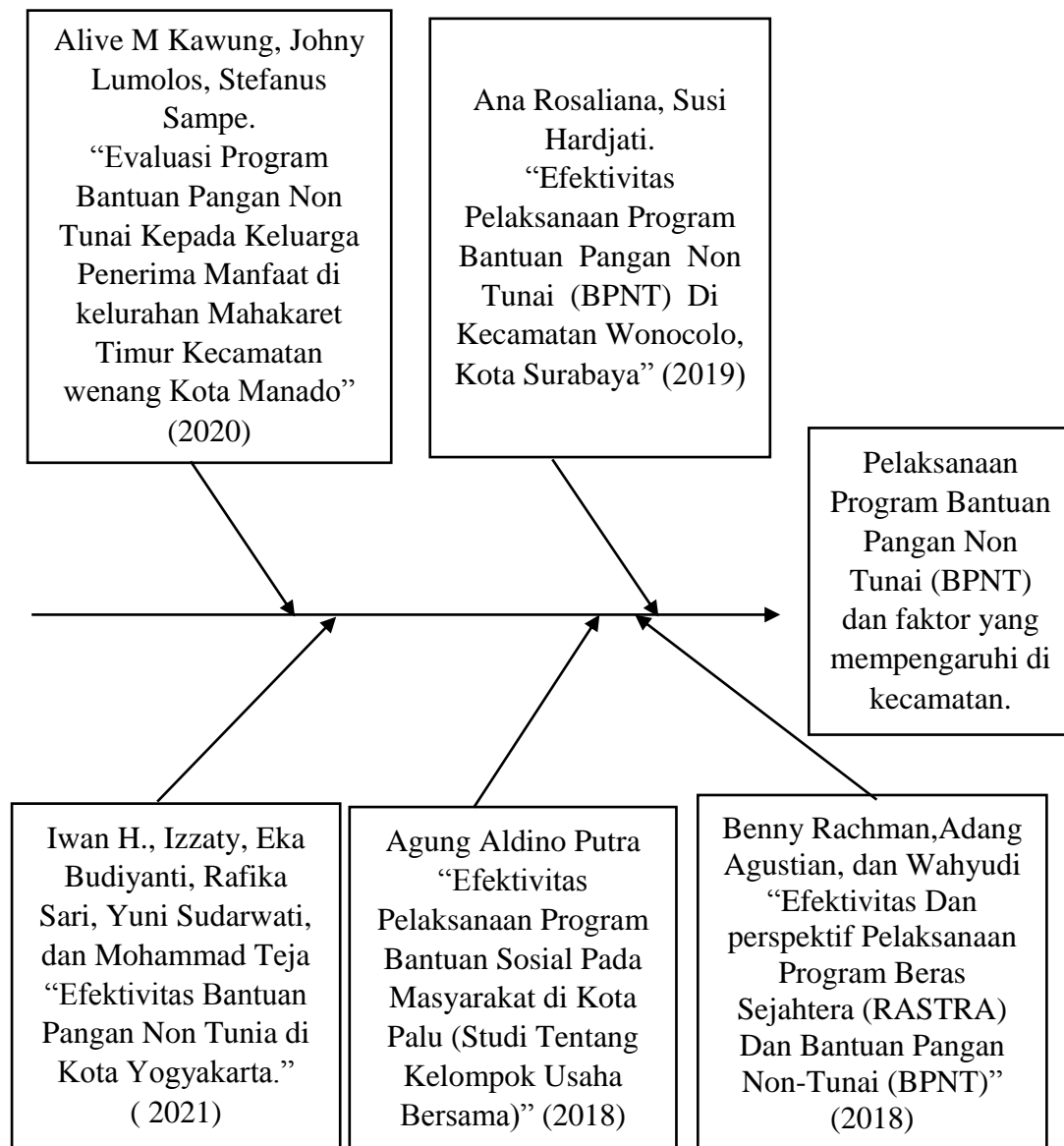
metode, benda, dan lain sebagainya yang akan memberikan keberhasilan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa sejauh ini langkah pemerintah dalam menjamin bantuan sosial tepat sasaran masih belum efektif dan memerlukan perbaikan. Dalam penentuan calon penerima BPNT, pemerintah memiliki beberapa kriteria agar pemberian bantuan tepat sasaran. Namun dari hasil temuan di lapangan teridentifikasi kurangnya pembaharuan informasi data, menyebabkan penerima BPNT yang masih belum memenuhi kriteria. Dalam hal pemanfaatan pilihan kebutuhan yang terbatas pada beras dan telur tersebut, pada dasarnya sebagian besar KPM menerima dengan baik apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Namun, ketepatan pilihan kebutuhan tersebut menjadi kurang efektif dikarenakan ada sebagian KPM yang menilai dan menginginkan pilihan kebutuhan dalam program BPNT tidak hanya beras dan telur. KPM mengharapkan agar penambahan pilihan kebutuhan pokok yang tersedia di e-warong dapat bertambah agar lebih memberikan banyak pilihan dan memberi manfaat yang lebih besar pada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian pilihan sasaran penggunaan KKS sebagai instrumen pembayaran dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari hasil penelitian dan data yang telah dijelaskan, bahwa terdapat indikasi ketepatan penggunaan KKS dinilai masih belum efektif. Hal ini dikarenakan masih adanya KPM yang menumpuk dana bantuannya atau sengaja tidak mengambil bantuan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat KPM yang sebenarnya kurang layak menerima BPNT karena terindikasi sebagai keluarga mampu. Selain dari segi pendataan, indikasi penggunaan KKS masih kurang efektif dan memerlukan perbaikan dapat dilihat dari infrastruktur.

3. Penelitian oleh Menurut Iwan H., Izzaty, Eka Budiyanti, Rafika Sari, Yuni Sudarwati, dan Mohammad Teja (2021) dengan judul **“Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunia di Kota Yogyakarta.”** sebagai kota

percontohan program BPNT berbagai kendala seperti Perkembangan dari penyerapan BPNT tersebut dianggap belum berjalan optimal karena realisasi penyaluran BPNT, pada saat awal program BPNT, pendamping BPNT dan pihak bank penyalur belum memahami konsep BPNT sehingga memberlakukan operasi bantuan yang sama seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sering ditemukan perbedaan data penerima BPNT yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan berada pada proses update data dari kantor pusat ke daerah memerlukan waktu sehingga tidak mampu mengakomodasi perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang berubah cepat.

4. Menurut Agung Aldino Putra dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama)”** Program Bantuan Pangan di pelaksanaan program bantuan Sosial Kube pada masyarakat di Kota Palu belum berjalan secara Efektif dan maksimal, karena ada beberapa aspek yang tidak berjalan secara Efektif yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Sosial Kota Palu sebagai pelaksana program, terjadi keterlambatan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, memilih calon penerima bantuan tidak mengikuti prosedur yang ada karena adanya pihakpihak lain yang sengaja memanfaatkan untuk dapat menerima bantuan kube, tidak ada di lakukan sosialisasi untuk bantuan tersebut, hanya saja pernah masuk surat dari dinas sosial mengenai penerimaan proposal bantuan kube.
5. Penelitian oleh Benny Rachman, Adang Agustian, dan Wahyudi dengan judul **“Efektivitas dan perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)”**. Dari hasil penelitian ini Nilai *Customer Satisfaction Index* (CSI) pada BPNT tergolong dalam kategori *cause for concern*, sedangkan nilai CSI pada Rastra tergolong dalam kategori *very poor*. Sebaiknya pada program Rastra, beras tidak dibagi rata kepada warga yang tidak terdaftar karena hal ini akan mengurangi jumlah beras yang diterima oleh penerima

manfaat yang terdaftar. Oleh karena itu, petugas kelurahan sebaiknya ikut serta dalam penyaluran beras agar mengetahui kuantitas dan kualitas beras yang dibagikan. Pemerintah hendaknya mengevaluasi dan menambah jumlah persediaan sembako dan e-warong pada program BPNT sehingga dapat meningkatkan kepuasan penerima program. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidaknyamanan dan mengurangi risiko penerima manfaat tidak mendapatkan sembako. Secara agregat KPM (51%) menilai kualitas beras pada program Rastra maupun BPNT perlu ditingkatkan. Sisanya 49% KPM menilai bahwa kualitas beras cukup memadai. Ketepatan administrasi program BPNT dilihat dari jumlah dan sebaran e-warong dalam melayani KPM. Jumlah e-warong dan agen bank di lokasi kajian masih kurang karena idealnya satu e-warong atau agen melayani 150-200 KPM, tetapi hingga saat survei dilakukan, satu agen bank melayani 250-400 KPM.



Gambar 2.1 Diagram Fishbone

Berdasarkan diagram di atas, untuk dapat melihat *novelty* dari penelitian terdahulu diuraikan dengan tabel penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Alive M Kawung, Johny Lumolos, Stefanus Sampe (2020) adalah penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas program kepada masyarakat penerima di wilayah Kecamatan Cikeusal sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada evaluasi komponen-komponen program bantuan dengan teori Suharsimi Arikunto (2004:13)

- b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ana Rosaliana, Susi Hardjati (2019) adalah penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas program kepada masyarakat penerima di wilayah Kecamatan Cikeusal sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada operasional, peran dan manfaat dari program.
- c. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Iwan H., Izzaty, Eka Budiyanti, Rafika Sari, Yuni Sudarwati, dan Mohammad Teja (2021) adalah penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas program kepada masyarakat penerima di wilayah Kecamatan Cikeusal sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada kerjasama antar *stakeholder* dalam program.
- d. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Aldino Putra (2018) adalah penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas program kepada masyarakat penerima di wilayah Kecamatan Cikeusal sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada percepatan pengentasan kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama Usaha dengan Ekonomi Produktif sesuai dengan potensi masing-masing masyarakat miskin.
- e. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Benny Rachman, Adang Agustian, dan Wahyudi (2018) adalah penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas program kepada masyarakat penerima di wilayah Kecamatan Cikeusal sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada lanjutan program penanggulangan kemiskinan dari program sebelumnya sampai program terbaru.

Penjelasan penelitian yang telah dijelaskan di atas memiliki beberapa persamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama membahas mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu fokus penelitian dimana peneliti akan melihat monitoring dan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta akan fokus hanya pada satu program penanggulangan kemiskinan berupa program Bantuan Pangan

Non Tunai di wilayah Cikeusal. Penjelasan penelitian terdahulu diharapkan mampu mempertajam dan memperkuat penelitian yang dilakukan dengan tema yang relevan. Penelitian ini akan melihat fenomena pemberian bantuan program secara nontunai di Kecamatan Cikeusal Serang Banten apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan tujuan yang di harapkan, sehingga dalam penelitian ini akan lebih fokus dalam monitoring dan evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Cikeusal Serang Banten.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Richard (2006), menyatakan efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan oleh organisasi. Sedangkan Pasolong (2007), menjelaskan bahwa pada dasarnya efektivitas berasal dari kata “efek”, dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab-akibat. Efektivitas dipandang sebagai suatu “sebab” dari variabel lain. Suatu efektivitas dilihat berdasarkan pencapaian tujuan hasil atau pencapaian dari suatu tujuan. Efektivitas berfokus kepada *outcome* (hasil) atau dari suatu program atau kegiatan, yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Aliran input dan output merupakan titik awal dalam menggambarkan suatu organisasi. Dengan istilah yang sederhana, organisasi merupakan sumber daya (input) dari sistem yang lebih besar (lingkungan), memproses input dan mengembalikannya dalam bentuk yang telah diubah atau output (Ivancevich *et al*, 2007). Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Ihyaul, 2004). Steers dalam Sutrisno (2010), mengatakan pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu

laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya.

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah usaha yang dilakukan pada suatu program untuk mencapai tujuan atau sasaran dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana dan tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, Kurniawan (2005) mendefinisikan Efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi, dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Dari berbagai macam pengertian para ahli tentang efektivitas bisa disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran dalam mencapai suatu keberhasilan suatu program maupun kegiatan yang sudah di rencanakan sebelumnya untuk mencapai suatu keberhasilan, semakin banyak rencana berhasil mencapai tujuan dari suatu program maupun kegiatan semakin efektif. Suatu dapat di katakan efektif apabila program maupun kegiatan berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan.

2.2.2. Efektivitas Program

Efektivitas program merupakan suatu cara/upaya yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat Efektivitas Program dapat diketahui dengan membandingkan output program dengan tujuan program, apabila output atau hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan maka dapat dikatakan program tersebut tidak efektif.

Terdapat banyak cara atau pendapat untuk menilai apakah suatu program dikatakan efektif atau tidak. Antara lain, ada yang berpendapat bahwa suatu program dapat dikatakan efektif dapat dilihat dari pencapaian tujuan. Apabila tujuan dari program yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan baik maka program tersebut dikatakan efektif. Suatu program yang baik menurut tjokroamidjojo (1984) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran dengan biaya yang diperkirakan dan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut
5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Dengan demikian, dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

2.2.3. Ukuran-Ukuran Efektivitas

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai efektivitas baik untuk jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran efektivitas organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Produksi, merupakan gambaran kemampuan organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya.
2. Efisiensi, diartikan sebagai perbandingan (rasio) antara keluaran dengan masukan yang melibatkan perbandingan keuntungan dan

biaya. Kepuasan, berorientasi pada sikap untuk menunjukkan sampai seberapa jauh kebutuhan kepuasan telah tercapai.

3. Adaptasi, sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang kemudian akan ditanggapi, dan jika tidak dapat meneysuaikan maka kelangsungan hidup akan terancam.

Menurut Kartikahadi dalam Cicilia *et al*, (2015), efektivitas merupakan produk akhir dari suatu kegiatan operasi yang telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, serta batas waktu yang ditargetkan. Adapun ukuran-ukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan atau hasil pencapaian tujuan merupakan suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan.
2. Efisiensi merupakan pemberian penilaian apakah kualitas kinerja yang terdapat dalam pelaksanaan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
3. Kepuasan kelompok sasaran kriteria ini melihat dampak secara langsung dari program yang dilakukan terhadap kelompok sasaran.
4. Daya tanggap *client* aspek ini berkaitan dengan bagaimana daya tanggap kelompok sasaran terhadap program yang diberikan.
5. Sistem pemeliharaan adanya instansi yang stabil dan berkelanjutan untuk mengelola program (Tangkilisan, 2005).

Menurut Makmur dalam Rosliana (2019), mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran; Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional.
2. Ketepatan penentuan waktu; Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Ketepatan dalam menentukan pilihan; Ketepatan dalam menentukan pilihan adalah ketepatan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda dan lain sebagainya.
4. Ketepatan dalam menentukan tujuan; Suatu organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi.

Sutrisno Hadi dalam Jannah (2016) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu:

1. Pemahaman program : dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program. Pemahaman program oleh masyarakat meliputi mekanisme pelaksanaan program, pemanfaatan program, informasi program baik secara umum maupun khusus.
2. Tepat sasaran : dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan. Selain itu sejauh mana program sesuai dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peserta program harus memiliki kesesuaian dengan apa yang ditawarkan program.
3. Tepat waktu : dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan : diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
5. Perubahan nyata : diukur melalui kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pengertian efektivitas merupakan ukuran keberhasilan kegiatan ataupun program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana menurut Mahmudi yang mengatakan efektivitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, maka

semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas kebijakan tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dalam perkembangan, dan dampak nyata.

Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan Indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat atau sesuai dengan sasaran program yang telah ditentukan.
2. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai program dapat diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada sasaran program.
3. Pencapaian tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan.
4. Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2.2.4. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

1. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan

dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. 9 Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan Lembaga.

2.3. Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang diberikan kepada individu/masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Diberikan bantuan bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat, lanjut usia terlantar non potensial), dan dapat berupa uang barang maupun jasa.

2.4. Kriteria Pemberian Bantuan

Pemberian bantuan memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. Selektif
- b. Memenuhi persyaratan penerimaan bantuan
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
- d. Sesuai tujuan penggunaan

Kriteria selektif sebagaimana maksud pada huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi

dari kemungkinan resiko sosial. Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :

- a. Memiliki identitas yang jelas
- b. Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Serang Banten

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan tidak lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. Rehabilitas Sosial
- b. Perlindungan Sosial
- c. Pemerdayaan Sosial
- d. Jaminan Sosial
- e. Penanggulangan Sosial
- f. Penanggulangan Bencana

2.5. Jenis Dan Tujuan Bantuan Sosial

Jenis dan tujuan bantuan meliputi sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial supaya nantinya dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Perlindungan sosial, yaitu mencegah dan menangani risiko sosial seseorang, keluarga, dan kelompok agar kelangsungan hidupnya dapat berjalan dengan lancar.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu bansos dapat menjadikan seseorang atau kelompok sosial yang mengalami masalah sosial mempunyai daya dalam menanggulangi problematikanya.

- d. Jaminan sosial, yaitu penerima bantuan terjamin dalam mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- e. Tujuan bansos, yaitu penanggulangan kemiskinan atau program/kegiatan/kebijakan yang dilakukan untuk individu/keluarga/kelompok sosial yang tidak memiliki pencaharian atau tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. Penanggulangan bencana, yaitu bansos diberikan dan ditujukan untuk rehabilitasi terhadap bencana yang sempat melanda masyarakat.

2.6. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pemerintah melakukan reformasi dengan mengganti Raskin dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada awalnya, program BPNT merupakan program pengganti dari program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. Pada awalnya, program BPNT merupakan program pengganti dari program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. Pergantian program Rastra menjadi BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu: Pertama, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan *Exclusion Error* dan *Inclusion Error* yang tinggi. *Exclusion error* misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, *Inclusion Error* sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut. Kedua, indikator tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp. 1.600 per-kg. Ketiga, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan. Melihat dari permasalahan-permasalahan dari program Rastra tersebut, maka pada tahun 2016 hingga 2017,

pemerintah mulai melakukan perubahan terkait program Rastra, menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang di berikan kepada (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang di gunakan hanya untuk membeli pangan di e-warong pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank HIMBARA. Menurut Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (2017), tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.
5. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sementara manfaat dari program BPNT ialah:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Menurut tim pengendali pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai (2017), prinsip umum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM).
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat (KPM) tentang kapan, berapa, jenis dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan preferensi.
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani keluarga penerima manfaat (KPM).
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

2.6.1 BPNT secara Normatif

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan sosial yang diberikan, dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tingkat pusat, yang terdiri dari pemerintah, pemangku kepentingan lainnya, dunia usaha dan masyarakat. Kemudian membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tanggal 26 April 2016 dalam rapat terbatas tentang keuangan inklusif Presiden Joko Widodo memberikan arahan jika bansos subsidi disalurkan secara non tunai, Saat ini strategi tersebut telah berjalan melalui penyaluran bantuan sosial secara nontunai yang diharapkan dapat meningkatkan keefektifitasan dan ketepatan sasaran serta mendorong keuangan inklusif, salah satunya melalui program Bantuan Pangan Non Tunai.

2.6.2 BPNT secara Programik

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bansos yang ditransformasi dari bansos bantuan Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan dalam penyalurannya. Melalui Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi secara spesifik Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan jika mulai pada

awal tahun 2017 anggaran penyaluran manfaat agar dilakukan melalui mekanisme nontunai (menggunakan teknologi kupon elektronik atau e-voucher). Sehingga pada awal tahun 2017 tepatnya bulan februari program BPNT mulai dilaksanakan secara serentak di 44 kota di Indonesia.

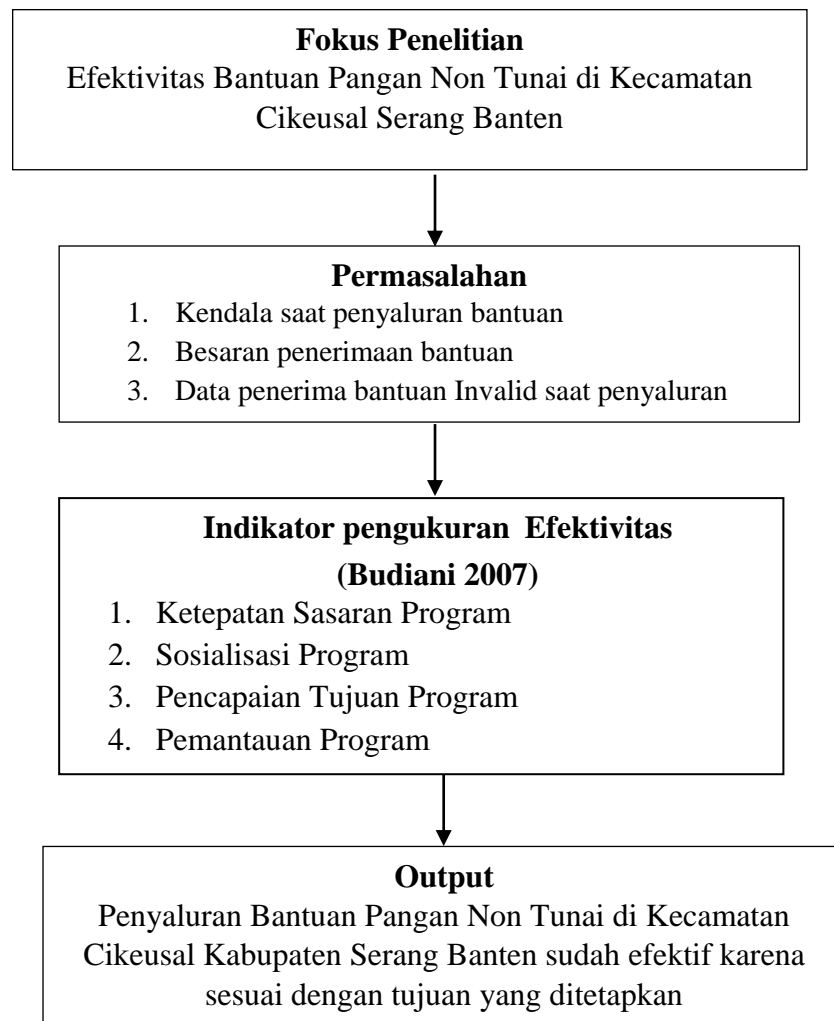
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan dengan secara bertahap. Beberapa daerah yang telah terpilih sebagai pilot *project* berarti telah memiliki kesiapan berupa infrastruktur pembayaran dan jejaring telekomunikasi, kesiapan bahan pangan dan usaha eceran yang ada, serta dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk menunjang hal tersebut sehingga ada indikator yang perlu di uji coba yaitu berupa mekanisme pelaksanaan dan kesiapan teknologi. Hal ini diperlukan karena penyalurannya dilakukan dengan melalui jaringan system pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang turut mengikutsertakan Bank penyalur, *principal* dan perusahaan *Switching* karena prinsipnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah mudah dijangkau KPM dan dapat digunakan, memberikan keleluasaan dan kendali dalam memilih kuantitas dan kualitas bahan pangan, mendorong usaha eceran untuk melayani KPM serta KPM diberikan akses jasa keuangan.

2.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dari penjelasan teori tentang penanggulangan kemiskinan dan program bantuan pangan non tunai saling berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia bagaimana berjalannya program tersebut apakah sudah berjalan semestinya dan memberikan dampak yang signifikan sesuai tujuan program di buat. Dalam penelitian ini seberapa jauh bantuan pangan nontunai dalam kesejahteraan masyarakat. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan dari permasalahan dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya maka dalam penelitian ini

penulis menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani (2007), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat atau sesuai dengan sasaran program yang telah ditentukan.
2. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai program dapat diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya oleh peserta sasaran program
3. Pencapaian tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan.
4. Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan setelah terlaksananya kegiatan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

1. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat atau sesuai dengan sasaran program yang telah ditentukan.
2. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai program dapat diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya oleh peserta sasaran program.
3. Pencapaian tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

4. Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan setelah terlaksananya kegiatan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta.